

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

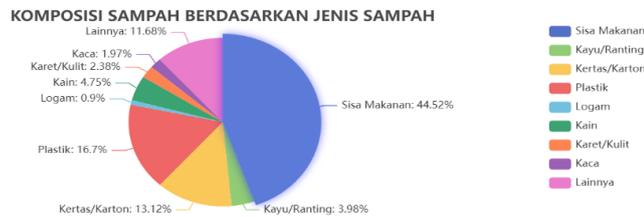
### **1.1 Latar Belakang**

Permasalahan lingkungan menjadi permasalahan yang sangat serius bagi kota-kota besar di Indonesia karena dapat menurunkan kualitas lingkungan. Kota Bandung dengan jumlah penduduk sebanyak 2.469.589 jiwa menyebabkan munculnya masalah lingkungan, salah satunya adalah masalah persampahan.

Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) yang merupakan sebuah situs online yang membahas tentang suatu sistem yang mengelola data mengenai pengelolaan sampah rumah tangga di seluruh Kota/Kabupaten di Indonesia, berdasarkan data timbulan sampah di Indonesia.

Sampah sendiri merupakan suatu benda yang sehari-hari ada disekitar kita yang sudah dianggap tidak berharga lagi dan tidak bernilai. (Hartono et al.,2020). Menurut WHO (*World Health Organization*) sampah merupakan suatu materi yang sudah tidak digunakan, tidak dipakai lagi, tidak disenangi atau sesuatu yang sudah dibuang yang berasal dari kegiatan manusia. Sedangkan menurut (UU No 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah) sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari atau proses alam yang berbentuk padat.

Pertambahan timbulan sampah disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah karena meningkatnya suatu aktifitas masyarakat yang dapat menyebabkan adanya peningkatan pola konsumsi masyarakat sehingga akan menghasilkan pertambahan sampah sehari-harinya (Suryani, 2014a).



Sumber: SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, MENHLK

Gambar 1.1 Timbulan Sampah Berdasarkan Sumber Sampah Tahun 2020-2023

Berdasarkan pada gambar 1 di atas mengenai timbulan sampah yang didasarkan pada sumbernya di Kota Bandung selama tahun 2022, maka dapat dilihat bahwa sampah rumah tangga menjadi salah satu sumber sampah yang paling banyak yaitu 60% serta sisanya dihasilkan dari kegiatan perkantoran, fasilitas publik, kawasan, perniagaan, dan juga lain-lain.

Faktor moralitas adalah elemen atau aspek yang memengaruhi perkembangan moralitas seseorang. Moralitas sendiri adalah aturan nilai-nilai tentang apa yang harus dilakukan, yang menunjukkan perbuatan manusia yang benar atau salah. Beberapa contoh nilai moral yang umum adalah kejujuran, keadilan, toleransi, kebaikan hati, dan tanggung jawab. Selain itu, nilai moral juga sering dihubungkan dengan agama atau sistem keyakinan seseorang, walaupun nilai moral juga bisa berasal dari sumber-sumber lain seperti filsafat atau norma-norma masyarakat.

Hubungan antara faktor moralitas dengan permasalahan lingkungan dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Pengaruh Lingkungan

- Lingkungan memiliki peran penting dalam pembentukan moralitas seseorang. Lingkungan yang baik dan sehat dapat

memengaruhi perilaku seseorang untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan kebersihan. Sebaliknya, lingkungan yang buruk dapat memengaruhi perilaku yang tidak baik dan tidak peduli terhadap lingkungan.

## 2. Perilaku Menjaga Kesejahteraan Lingkungan

- Faktor moralitas dapat memengaruhi perilaku seseorang dalam menjaga kesejahteraan lingkungan. Studi menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara moral lingkungan dengan perilaku menjaga kelestarian lingkungan. Orang yang memiliki moralitas yang baik cenderung lebih peduli dengan lingkungan dan kebersihan.

## 3. Pendidikan Moral

- Pendidikan moral yang baik dapat membentuk moralitas seseorang yang lebih baik. Pendidikan moral yang diintegrasikan dalam kurikulum sekolah dan diwujudkan dalam contoh dan nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua dan guru dapat meningkatkan moralitas seseorang dan memengaruhi perilaku yang lebih baik terhadap lingkungan.

Dengan memahami hubungan antara faktor moralitas dengan permasalahan lingkungan, kita dapat mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan lingkungan melalui pembentukan moralitas yang lebih baik.

Sampah rumah tangga adalah bahan atau benda yang dibuang dari aktivitas di dalam rumah tangga, sebagian besar berasal dari bahan organik seperti sisa-sisa dari hasil dapur/hasil memasak, rumah tangga juga menghasilkan sampah padat yang tidak mudah terurai seperti berbahan plastik, kertas, kaleng, kaca, karet dan besi dari sisa kegiatan rumah tangga. Adanya sampah rumah tangga setiap harinya membuat timbulan sampah semakin meningkat sehingga banyak sampah yang tercecer karena tidak terangkut secara optimal. Hal ini akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan karena menimbulkan bau tidak sedap, kotor, berpotensi menimbulkan penyakit dari mikroorganisme yang ada di sampah dan juga merusak keestetikaan lingkungan. Berikut adalah data timbulan sampah yang ada di Provinsi Jawa Barat berdasarkan Kota Bandung tahun 2020-2023.

**Tabel 1.1 Data Timbulan Sampah Kota Bandung tahun 2020-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Timbulan Sampah Harian(ton)</b>	<b>Timbulan Sampah Tahunan(ton)</b>
2020	Jawa Barat	Kota Bandung	1,539.82	562,034.59
2021	Jawa Barat	Kota Bandung	1,592.55	582,280.03
2022	Jawa Barat	Kota Bandung	1,594.18	582,876.52
2023	Jawa Barat	Kota Bandung	1,379.80	503,627.36
		<b>Total</b>	<b>6,106.35</b>	<b>2,228,818.49</b>

Sumber: SIPSAN – Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, MENHLIK

Dari data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) bahwa di Kota Bandung terdapat timbulan sampah sebesar 2,228,818.49 ton timbulan sampah pada tahun 2020-2023, jumlah timbulan sampah tersebut didapatkan dari hasil rata-rata jumlah sampah harian tertimbul 6,106.35 ton timbulan sampah. Dari data di atas berdasarkan jumlah timbulan sampah dari tahun 2020-2023 di Provinsi Jawa Barat dapat disimpulkan bahwa Kota Bandung merupakan penghasil timbulan sampah terbesar di tahun 2020-2023 yang berasal dari 30 Kecamatan.

Kota Bandung menjadi penghasil sampah terbanyak setiap harinya bahkan setiap tahunnya, hal ini dikarenakan kota Bandung menjadi titik pusat aktivitas masyarakat, seperti pusat pendidikan, pembangunan, pekerjaan, dan kegiatan lainnya yang menghasilkan sampah lebih banyak. Untuk itu, dilakukan pengelolaan sampah untuk mengurangi penimbulan sampah di masyarakat sehingga Kota Bandung dapat terlihat lebih bersih dari sampah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga, khususnya yang berkaitan dengan prinsip umum pengelolaan sampah yang baik dan penerapan *reduce, reuse, recycle*(3R), serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi masyarakat dan Pemerintah dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Bandung.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei di Kecamatan Bandung Wetan di Kota Bandung. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *Quota Sampling* dengan jumlah responden sebanyak 35 orang dari 3 Kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku masyarakat dalam penerapan prinsip umum

pengelolaan sampah sudah berjalan baik, Namun penerapan prinsip 3Rnya dapat dikatakan kurang baik. Kendala yang dihadapi masyarakat antara lain:

1. Ada 33% masyarakat yang menyatakan belum terlayani penjemputan sampah ke rumahnya.
2. Ada juga 23% masyarakat yang menyatakan belum tersedia TPS di lingkungan RTnya.

Selain kendala di atas terungkap juga bahwa penjemputan sampah terkadang tidak dilaksanakan setiap hari dan keberadaan tong sampah di depan rumah sering hilang diambil maling dan juga sebagian masyarakat belum mengetahui cara pengelolaan sampah. Kendala yang dihadapi Pemerintah, sebagai berikut:

1. Kurangnya fasilitas seperti TPS, Armada pengangkut sampah.
2. Belum semua wilayah di Kota Bandung dapat dilayani oleh Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan (Distaksiman).
3. Kurangnya tenaga ahli 3R.

Berikut data geografi dari masing-masing Kecamatan :

Kecamatan Bandung Wetan dengan luas wilayah 3.44 km<sup>2</sup>, terdiri atas 3 kelurahan yakni : Tamansari, Citarum, dan Cihapit. Jumlah penduduk sebanyak 29.248 jiwa (2.03 persen dari total penduduk Kota Bandung), kecamatan ini memiliki kepadatan 52.61 jiwa/km<sup>2</sup> dalam pengelolaan sampah rumah tangga menggunakan jasa pengangkutan sampah yang dikelola oleh RT/RW setempat. Penentuan tarif/iuran masyarakat dan frekuensi pengangkutan sampah belum

memiliki ketentuan dari Pemerintah ataupun Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

**Tabel 1.2 Data Geografi Kecamatan Bandung Wetan**

<b>Kelurahan</b>	<b>Luas Total Area (<math>\text{km}^2/\text{sq.km}</math>)</b>	<b>Persentase</b>
Tamansari	1,02	30,07
Citarum	1,3	33,69
Cihapit	1,12	36,23
<b>Kecamatan Bandung Wetan</b>	<b>3,44</b>	<b>100</b>

Sumber: <http://data.bandung.go.id>

Kecamatan Bandung Wetan dengan luas wilayah  $3.44 \text{ km}^2$ , terdiri atas 3 kelurahan, yakni : Tamansari, Citarum, dan Cihapit. Jumlah penduduk sebanyak 29.248 jiwa (2.03 persen dari total penduduk Kota Bandung), kecamatan ini memiliki kepadatan  $52.61 \text{ jiwa/km}^2$ .

Pengelolaan sampah rumah tangga menggunakan jasa pengangkutan sampah yang dikelola oleh RT/RW setempat. Penentuan tarif/iuran masyarakat dan frekuensi pengangkutan sampah belum memiliki ketentuan dari Pemerintah ataupun Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa warga, tarif dan frekuensi pengangkutan berbeda-beda. Warga mengatakan Tarif yang ditentukan oleh petugas pengelola sampah sudah sesuai dan adapula yang mengatakan perlu ditingkatkan agar kinerja petugas pengelola lebih optimal.

Timbulan sampah tidak dapat dihentikan tetapi harus dikelola, dikurangi atau diminimalisir secara baik (Pratiwi & Kasmawati, 2019). Saat ini, pengelolaan sampah masih menjadi tanggung jawab semua pihak, baik Pemerintah maupun

masyarakat, karena kita berperan penting dalam menjaga lingkungan. Sampah bukan hanya lagi sesuatu yang tidak digunakan, tetapi dapat digunakan kembali jika diolah dengan benar (Puspita et al., 2023). Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengatasi persoalan sampah di Indonesia yang masih sangat besar, pemerintah harus bersama masyarakat membangun pengelolaan sampah untuk menuju Indonesia bersih, Indonesia maju, Sampah Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terdiri atas pengurangan sampah yang meliputi pembatasan Timbulan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah.

Penilaian tentang peningkatan pengelolaan sampah di Kecamatan Bandung Wetan sangat perlu dilakukan untuk melihat peran dan tingkat kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pengelolaan sampah yang lebih baik. Untuk mengikutsertakan masyarakat Kecamatan Bandung Wetan dalam meningkatkan pengelolaan sampah, terlebih dahulu harus diketahui seberapa besar keinginan masyarakat untuk membayar iuran sampah dalam meningkatkan pengelolaannya. Tarif pengangkutan sampah tidak bisa ditentukan oleh harga pasar. Oleh karena itu, diperlukan metode untuk dapat menentukan tarif yang sesuai dengan kemampuan dan kemauan penerima manfaat untuk membayar demi menjaga keberlanjutan infrastruktur publik tersebut (Marselina, 2021).

Oleh sebab itu, diperlukan suatu kajian terhadap kesediaan membayar (*Willingnes To Pay*) dan kemampuan membayar (*Ability To Pay*). Mengukur WTP dalam penelitian ini dapat memahami seberapa besar nilai yang diberikan oleh masyarakat terhadap layanan pengelolaan sampah dan apakah mereka merasa

mendapatkan manfaat yang cukup untuk tarif yang dibebankan. Ini juga mencerminkan sejauh mana masyarakat menyadari pentingnya pengelolaan sampah yang efektif, yang akan memengaruhi kesediaan mereka untuk membayar tarif yang lebih tinggi jika layanan yang diberikan memadai.

Mengukur ATP dalam penelitian ini memungkinkan perencanaan tarif yang adil dan proporsional sesuai dengan tingkat pendapatan masyarakat. Ini akan membantu pemerintah dalam menetapkan tarif yang tidak hanya rasional secara ekonomi tetapi juga sosial, memastikan bahwa masyarakat dapat membayar dengan wajar tanpa membebani mereka secara berlebihan.

WTP atau kesediaan membayar adalah besaran uang yang bersedia dibayarkan seseorang terhadap pelayanan jasa lingkungan (Nainggolan, 2019), sedangkan ATP atau kemampuan membayar adalah kemampuan seseorang untuk membayar jasa pelayanan yang diterimanya dan kemampuan ini disesuaikan dengan besarnya penghasilan. Semakin besar penghasilan seseorang atau sebuah rumah tangga, maka akan semakin tinggi pula tingkat kemampuan membayarnya terhadap sesuatu keperluan (Wicaksono, Bambang, dan Dianita 2006).

Penelitian ini sangat penting untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi moralitas masyarakat dalam membayar retribusi sampah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta memperkuat moralitas masyarakat dalam menjaga kebersihan dan lingkungan yang lebih baik. Oleh sebab

itu, penulis mengambil judul penelitian **“Faktor Moralitas Penentu Keinginan Masyarakat Kota Bandung Membayar Retribusi Sampah”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Merujuk pada pemaparan latar belakang sebelumnya terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan, maka hal yang paling mendasar dari permasalahan tersebut dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kemampuan masyarakat Kota Bandung dalam membayar retribusi sampah?
2. Bagaimana keinginan masyarakat Kota Bandung dalam membayar retribusi sampah?
3. Apakah adanya hubungan antara moralitas masyarakat dan perilaku mereka dalam membayar retribusi sampah, serta bagaimana penerapan faktor moralitas dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Bandung?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan diantaranya yaitu:

1. Menganalisis hubungan antara moralitas masyarakat dan perilaku mereka dalam membayar retribusi sampah di Kota Bandung.
2. Mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi kesediaan masyarakat untuk membayar iuran sampah di Kota Bandung.
3. Membuat rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Bandung melalui penerapan faktor moralitas.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan penulis dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi pemerintah penelitian ini bermanfaat sebagai bahan informasi dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam bidang kebersihan.
2. Penelitian ini bermanfaat untuk menjadi masukan kepada masyarakat agar lebih memperhatikan kualitas lingkungan hidup yang sehat agar terhindar dari dampak sampah.
3. Bagi peneliti/mahasiswa agar dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan informasi tambahan untuk penelitian selanjutnya.
4. Penelitian ini membantu memahami lebih jauh tentang moralitas dan bagaimana faktor-faktor seperti religiusitas dan budaya Sunda memengaruhi perilaku moral masyarakat. Hal ini penting untuk memahami bagaimana keinginan masyarakat untuk membayar retribusi sampah di pengaruhi oleh nilai-nilai yang mereka anut.
5. Penelitian tentang hubungan antara interaksi sosial dan perkembangan moral menunjukkan bahwa semakin baik iinteraksi sosial, semakin baik pula perkembangan moral.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

Penelitian ini mengkaji interaksi infrastruktur masyarakat-lingkungan di MSWM (*Municipal Solid Waste Management*) dengan menganalisis preferensi warga dan WTP terhadap layanan MSWM adaptif. Studi ini menggunakan pendekatan yang berpusat pada masyarakat dan mengkaji persepsi dan sikap masyarakat terhadap MSWM serta kontribusinya terhadap perbaikan infrastruktur. Untuk menganalisis interaksi manusialingkungan-infrastruktur, penelitian ini menggunakan logit parameter acak RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) dan model kelas laten (LCM) untuk memperhitungkan heterogenitas individu yang tidak teramati, seperti pendapatan, usia, kondisi kehidupan, dan kesadaran akan perubahan iklim dan sistem dan infrastruktur MSWM saat ini. Model-model ini memungkinkan pemahaman bagaimana karakteristik masyarakat berinteraksi dengan preferensi mereka dan WTP untuk layanan MSWM adaptif guna mengurangi dampak lingkungan.

Permasalahan MSWM secara tidak langsung berdampak pada gas rumah kaca yang memicu perubahan iklim dari perilaku manusia dalam memperlakukan dan mengelola lingkungan (Roy dkk., 2022). Oleh karena itu, diperlukan konsep adaptasi dalam menyusun kembali tindakan-tindakan untuk mengurangi bahaya atau ancaman secara umum dan tidak hanya berkaitan dengan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Perhatian masyarakat internasional dan nasional terhadap rencana adaptasi perubahan iklim semakin meningkat seiring

dengan dampak yang ditimbulkan dan dirasakan oleh hampir seluruh negara di dunia (Lee, Paavola & Dessai, 2022). Penataan ruang kota dan ancaman perubahan iklim menjadikan kota rentan (Mensah, Amponsah, Opoku, Ahadzie & Takyi, 2021) karena buruknya kualitas MSWM dan pelanggaran. Hal ini menunjukkan pentingnya adaptasi sebagai upaya strategi pengurangan bencana di perkotaan. Pada tingkat daerah, fokusnya adalah pada pengembangan kegiatan adaptasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Misalnya pengendalian aktivitas manusia dalam rangka pembangunan di Indonesia dilakukan dengan membatasi aktivitas tersebut pada wilayah yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang wilayah. Dalam penerapan kapasitas adaptif, terdapat lima dimensi yang telah ditetapkan dalam protokol IPCC, yaitu aset, fleksibilitas, organisasi sosial, pembelajaran, dan agensi (Bassett, Sharan, Suri, Advani & Giordano, 2022).

Penelitian mengenai faktor moralitas yang mempengaruhi keinginan masyarakat untuk membayar retribusi sampah menjadi sangat relevan dalam konteks pengelolaan sampah perkotaan. Kota Bandung, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, menghadapi tantangan serius terkait pengelolaan sampah. Retribusi sampah merupakan salah satu mekanisme penting untuk mendukung pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Namun, tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran retribusi sampah sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor moralitas.

Moralitas merupakan faktor penting yang mempengaruhi keinginan masyarakat Kota Bandung untuk membayar retribusi sampah. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam kebijakan dan program pengelolaan

sampah, serta meningkatkan kemudahan dan transparansi dalam pembayaran retribusi, diharapkan tingkat partisipasi masyarakat dapat meningkat. Hal ini akan mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kota Bandung.

## **2.2 Ekonomi Lingkungan**

Dalam ketentuan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum(JDIH, 2009) Pasal 42 dan 43 mengenai perlindungan dan pengelolaan sampah hidup dengan melalui instrument ekonomi lingkungan hidup yang juga meliputi tentang perencanaan pembangunan serta kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan hidup, dan insentif atau disinsentif sebagai upaya untuk melestarikan fungsi dari lingkungan hidup agar lingkungan dapat terlindungi serta dikelola dengan baik dan optimal agar dapat terhindar dari berbagai isu-isu lingkungan seperti pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Ekonomi lingkungan merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku maupun kegiatan manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (SDAL) yang terbatas agar dapat dipertahankan pemakaiannya bahkan dapat ditingkatkan dalam jangka panjang maupun berkelanjutan. Ekonomi lingkungan membahas tentang isu-isu lingkungan, yaitu dampak yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi manusia terhadap lingkungannya. Seperti yang terkuip pada National Bureau of Economic Research pada tahun 2012 yaitu ekonomi lingkungan membahas studi teoritis maupun empiris tentang efek ekonomi dari kebijakan lingkungan nasional dan lokal di semua negara. Isu-isu tertentu termasuk biaya serta manfaat dari adanya kebijakan alternatif lingkungan dalam menangani

pencemaran udara, kerusakan kualitas air, limbah padat, zat-zat yang beracun, serta pemanasan global.

Seperti yang ter kutip pada *National Bureau of Economic Research* pada tahun 2012 yaitu ekonomi lingkungan membahas studi teoritis maupun empiris tentang efek ekonomi dari kebijakan lingkungan nasional dan lokal di semua negara. Isu-isu tertentu termasuk biaya serta manfaat dari adanya kebijakan alternatif lingkungan dalam menangani pencemaran udara, kerusakan kualitas air, limbah padat, zat-zat yang beracun, serta pemanasan global. Konsep Keseimbangan Ekonomi Lingkungan:

a. Konsep Keseimbangan Materi (*Material Balance Concept*) Konsep ini membahas tentang sudut pandang sumber daya pada lingkungannya, yaitu keseimbangan materi/bahan di alam, yang berarti setiap jenis sumber daya yang berada di lingkungan memiliki fungsi dan peranannya pada lingkungan. Jumlah dari sumber daya alam serta peranannya tersebut akan berimplikasi pada sumber daya alam lainnya di lingkungan.

b. Konsep Analisis Biaya dan Manfaat (*Cost and Benefit Analysis Concept*) Konsep analisis biaya dan manfaat ialah merupakan suatu metode yang dipakai dalam menilai, apakah kegiatan dari konsumen tersebut layak atau tidak layak. Layak atau tidak layak ini didapatkan dari hasil analisis. jika biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada manfaat yang diterima maka sudah dipastikan bahwa kegiatan tersebut tidak layak dilakukan. Konsep analisis biaya manfaat ini diterapkan dalam memnaggulangi permasalahan lingkungan, seperti pencemaran lingkungan. Konsep ini diterapkan untuk melihat nilai sistematika baik itu dari segi keuntungan maupun kerugian segala perubahan produksi dan konsumsi konsumen dalam penanggulana pencemaran lingkungan.

c. Konsep Perlindungan Lingkungan (*Environment Protection Concept*) Konsep perlindungan lingkungan ini merupakan konsep yang bertujuan untuk mendapatkan kualitas lingkungan yang optimal, yang artinya kualitas lingkungan tersebut baik pada

sekarang maupun dimasa depan tetap terjaga kualitasnya. Konsep ini membahas tentang bagaimana agar sumber daya alam yang ada dilingkungan tidak hanya dimanfaatkan oleh kelompok tertentu dan akhirnya memberikan kerugian bagi manusia lainnnya, namun dapat digunakan manusia dengan ketentuan menjaga kualiatasnya sehingga pihak lain juga dapat menggunakannya.

### **2.3 Pengelolaan Sampah**

Menurut Undang-Undang (UU) No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dibahas pada pasal 19 mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pengelolaan yang dapat dilakukan terdiri dari dua cara, yaitu :

a. Pengurangan Sampah Pengurangan sampah dapat dilkakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah yaitu dengan meminimalisasi pemakain produk-produk yang dapat membuat sampah lebih banyak. Selanjutnya yaitu dengan daur ulang sampah yang dapat dilakukan dengan cara megolah kembali sampah-sampah menjadi suatu produk yang berguna sehingga dapat digunakan kembali. Langkah terakhir yaitu dengan cara pemanfaatan kembali sampah yaitu dengan cara menggunakan kembali sampah yang dapat digunakan berulang kali.

b. Penanganan Sampah Penanganan Sampah dapat dilakukan dengan cara pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai sifat sampah ataupun jenis dan jumlahnya, pengumpulan sampah dan dipindahkan ke tempat penampungan sampah sementara, serta pengangkutan sampah dari sumber sampah maupun dari penampungan sampah sementara ke tempat Pemerosesan sampah terakhir. Pengelolaan sampah ini dilakukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan dalam menjadikan sampah sebagai sumber

daya Menurut (BPSDM PU, 2018) atau Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pengelolaan sampah cukup rumit karena prosesnya melibatkan teknologi dan aspek yang diperlukan. Teknologi dan aspek yang diperlukan dalam pengelolaan sampah ini yaitu pengendalian timbulan sampah, penanganan timbulan sampah, pengumpulan sampah dan penyimpanannya, pengolahan sampah, serta pembuangan sampah. Semua aspek tersebut harus bersinergi agar pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik.

Kebijakan pengelolaan sampah perkotaan yang dikeluarkan oleh kementerian pekerjaan umum terdiri dari 5 komponen yang dianggap penting dalam mempengaruhi manajemen persampahan, yaitu :

a. Peraturan atau Hukum

Manajemen persampahan membutuhkan peraturan ataupun hukum yang dapat mengatur tentang pembentukan organisasi, pemungutan retribusi sampah, ketertiban masyarakat, ketertiban umum yang mengatur terkait sampah, serta rencana induk pengelolaan sampah.

b. Kelembagaan dan Organisasi

Aspek kelembagaan dan organisasi dalam pengelolaan sampah dibuat untuk mendukung upaya agar pengelolaan sampah lebih berstruktur karena adanya Kerjasama dengan kelembagaan maupun organisasi terkait tugas-tugas yang sudah ditentukan.

c. Teknik Operasional

Teknik operasional pengelolaan sampah meliputi dasar-dasar perencanaan seperti pewadahan sampah, Teknik pengumpulan sampah, pemindahan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah serta pemrosesan sampah akhir.

d. Pembiayaan/retribusi

Pembiayaan/retribusi dihitung berdasarkan biaya investasi yang diberikan, biaya operasi dan pemeliharaan alat-alat pengelolaan sampah, biaya manajemen, biaya dalam pengembangan sampah, serta biaya untuk pembinaan masyarakat tentang sampah.

e. Peran serta Masyarakat

Semua program pengelolaan sampah yang sudah dibuat membutuhkan partisipasi dari masyarakat untuk mewujudkannya dengan cara mengubah persepsi masyarakat agar lebih tertib sampah.

### **2.3.1 Sampah Rumah Tangga**

Menurut Undang-Undang (UU) No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan menurut (Purnama, 2016) Sampah rumah tangga ialah zat-zat ataupun benda-benda sisa dari hasil kegiatan manusia sehari-hari dalam tingkat rumah tangga seperti daun-daun yang kering, sisa makanan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, sisa masakan dapur, dan daging. Hampir seluruh kegiatan yang dilakukan masyarakat menghasilkan sisa (sampah) atau limbah, jumlah timbulan sampah yang dihasilkan tersebut tentunya sebanding dengan tingkat konsumsi dari masyarakat akan suatu barang-barang setiap harinya (Sejati, 2009).

Hartono,(2006) mendefinisikan secara fisik bahwa sampah memiliki suatu kandungan-kandungan yang didalamnya masih berguna akan tetapi nilai yang dikandung dari sampah-sampah tersebut sudah semakin berkurang, berkurangnya nilai sampah ini dikarenakan komposisi yang dikandung sampah sudah tidak diketahui karena sudah tercampur-campur dengan sampah lainnya.

Untuk itu sampah harus dilakukan pemilahan untuk memisahkan bahan sampah agar dapat meningkatkan nilainya melalui penggunaan lebih lanjut terhadap sampah tersebut. Jenis-jenis sampah menurut Undang-Undang (UU) No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, yaitu :

- a. Sampah rumah tangga, yaitu sampah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari masyarakat.
- b. Sampah sejenis rumah tangga merupakan sampah yang dihasilkan masyarakat dari kawasan industri, fasilitas publik dan fasilitas lainnya.
- c. Sampah spesifik adalah sampah yang mengandung racun, seperti sampahsampah yang dihasilkan dari adanya bencana alam serta sampah yang belum dikelola secara teknologi.

#### **2.4 Barang Publik**

Dalam ilmu ekonomi, (Fauzi, 2010) mendefinisikan barang publik sebagai barang yang mempunyai sifat *non-rivalry* dan *non-excludable*. Barang publik bersifat *non-rivalry* artinya ketika seseorang mengkonsumsi barang publik maka tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang yang sama. Dalam hal ini artinya tidak ada ketersaingan dalam mengkonsumsinya serta barang tidak akan habis ketika dikonsumsi (*non-divisibel*). Contoh dari barang publik

*non-rivalry* ini adalah saat seseorang menghirup udara tidak membuat udara tersebut habis sehingga siapa saja dapat menghirupnya karena udara tetap tersedia.

Barang publik bersifat *non-excludable* artinya ketika seseorang mengkonsumsi barang publik tersebut, seseorang itu tidak dapat melarang orang lain mengkonsumsi barang yang sama. Contoh dari Barang publik *non-excludable* ketika seseorang menikmati pemandangan yang bagus di pantai, maka seseorang itu tidak dapat atau sulit melarang orang lain untuk menikmati pemandangan yang sama karena pemandangan merupakan barang publik yang dapat dikonsumsi siapa saja.

Secara umum barang publik dapat diartikan sebagai sesuatu yang bisa dinikmati oleh semua orang yang apabila ketika barang publik dikonsumsi oleh seseorang maka dia tidak akan mengurangi konsumsi orang lain terhadap barang publik tersebut. Di mana barang publik ialah barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa saja, dalam artian bahwa produsen dan konsumen tidak dapat menendalikan siapa saja yang berhak mengkonsumsinya.

Teori barang publik menurut para ahli dalam buku Ekonomi Publik oleh (Guritno Mangkoesobroto, 2016) :

a. Teori Pigou Menurut Pigou teori dari barang publik adalah barang yang harus disediakan oleh pemerintahan dimana barang tersebut tersedia hingga tingkat kepuasan dari individu atas konsumsi akan barang publik tersebut sama dengan ketidakpuasan dari individu terhadap pajak yang dikenakan oleh pemerintah untuk penyediaan dari barang publik tersebut.

#### b. Teori Bowen

Dalam teori Bowen dikatakan bahwa penyediaan barang publik dapat dinikmati oleh siapa pun tanpa terkecuali.

#### c. Teori Lindahl

Teori Lindahl hampir sama dengan teori yang di disebutkan oleh Bowen di mana semua orang dapat menikmati barang publik tanpa terkecuali dengan adanya pembayaran konsumen berupa persentase dari total biaya atas penyediaan barang publik.

### **2.5 Teori Pelayanan (biaya)**

Keinginan masyarakat Kota Bandung untuk membayar retribusi sampah merupakan perpaduan kompleks antara aspek rasional dan non-rasional. Salah satu faktor non-rasional yang signifikan adalah moralitas. Moralitas individu dan kolektif dapat dipandang sebagai sebuah “biaya” psikologis yang timbul ketika seseorang tidak memenuhi kewajibannya. Dalam konteks pembayaran retribusi sampah, moralitas dapat diartikan sebagai kesadaran akan tanggung jawab individu terhadap lingkungan dan masyarakat.

Individu yang memiliki kesadaran moral yang tinggi cenderung merasa berkewajiban untuk membayar retribusi sampah, meskipun tidak ada pengawasan langsung. Sebaliknya, individu dengan moralitas yang rendah cenderung lebih mementingkan kepentingan pribadi dan enggan membaya retribusi sampah. Selain itu, moralitas juga dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Jika norma sosial yang ada mendorong masyarakat untuk berperilaku

bertanggung jawab terhadap lingkungan, maka kemungkinan besar masyarakat akan lebih terdorong untuk membayar retribusi sampah. Sebaliknya, jika norma sosial yang ada justru mentoleransi perilaku tidak bertanggung jawab, maka masyarakat akan cenderung enggan membayar retribusi sampah. Dengan demikian, moralitas dapat dianggap sebagai sebuah “biaya” sosial yang dapat memengaruhi pembayaran retribusi sampah.

### **2.5.1 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah ditetapkan berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pendapatan asli daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada UU RI No. 28 Tahun 2009 terkait dengan pajak dan retribusi daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan pada peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sebagai salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah.

Pendapatan asli daerah memiliki fungsi melalui pajak yaitu sebagai pengisi kas dan sebagai pengatur. Sebagai alat anggaran pajak digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah. Sedangkan fungsi kedua yaitu sebagai pengatur yang dimaksudkan terutama untuk mengatur perekonomian guna menuju pada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan redistribusi pendapatan dan serta stabilisasi ekonomi. Terdapat beberapa sumber-sumber pendapatan asli daerah yaitu seperti pajak, retribusi

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain- lain pendapatan asli daerah yang sah.

## **2.6 Teori Ekonoomi Publik Mikro**

Dalam konteks ekonomi publik mikro, pembayaran retribusi sampah di Kota Bandung dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk moralitas masyarakat. Faktor moralitas ini dapat dilihat melalui kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah dan kebijakan yang diimplementasikan. Jika masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap Pemerintah, mereka lebih cenderung untuk membaya retribusi sampah karena melihat bahwa uang tersebut digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat dan transparan.

Sebaliknya, ketidakpercayaan masyarakat dapat menyebabkan mereka enggan membayar retribusi, terutama jika mereka merasa bahwa uang tersebut tidak digunakan secara efektif atau transparan. Selain itu, moralitas juga terkait dengan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan dan dampak negatif dari tidak membayae retribusi. Masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi tentang lingkungan dan kebersihan akan lebih cenderung untuk membayar retribusi sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, Pemerintah harus melakukan kampanye dan edukasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembayaran retribusi sampah, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi.

## **2.7 Konsep Moralitas**

Moralitas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Moralitas memberikan panduan tentang apa yang dianggap benar dan salah, dan membantu individu untuk membuat keputusan yang etis dan bertanggung jawab. Ada banyak teori moral yang berbeda, tetapi sebagian besar teori ini berfokus pada konsep-konsep seperti kewajiban, hak, keadilan, dan kebaikan.

Beberapa teori moralitas yang mungkin relevan dengan penelitian tentang faktor moralitas penentu keinginan masyarakat Kota Bandung membayar retribusi sampah adalah:

### **2.7.1. Teori Moralitas Utilitarianisme**

Teori ini berfokus pada konsekuensi dari tindakan dan berpendapat bahwa tindakan yang benar adalah yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbesar. Dalam konteks penelitian ini, teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa individu yang memiliki moralitas tinggi mungkin lebih cenderung membayar retribusi sampah, karena mereka percaya bahwa ini adalah cara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

### **2.7.2. Teori Moralitas Kantian**

Teori ini berfokus pada konsep kewajiban moral dan tanggung jawab individu. Menurut (Kant, 1804) individu memiliki kewajiban moral untuk bertindak dengan cara yang menghormati hak dan martabat orang lain. Dalam konteks penelitian ini, teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa individu yang memiliki moralitas tinggi mungkin lebih cenderung membayar retribusi sampah,

karena mereka percaya bahwa ini adalah kewajiban mereka untuk berkontribusi pada kebaikan bersama.

### **2.7.3. Teori Moralitas Deontologi**

Teori ini berfokus pada aturan dan prinsip moral dan berpendapat bahwa tindakan yang benar adalah yang sesuai dengan aturan dan prinsip ini, terlepas dari konsekuensinya. Dalam konteks penelitian ini, teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa individu yang memiliki moralitas tinggi mungkin lebih cenderung membayar retribusi sampah, karena mereka percaya bahwa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan, bahkan jika mereka tidak melihat manfaat langsungnya.

### **2.7.4. Teori Moralitas Normatif**

Teori ini berfokus pada norma dan nilai sosial dan berpendapat bahwa tindakan yang benar adalah yang sesuai dengan norma dan nilai ini. Dalam konteks penelitian ini, teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa individu yang memiliki moralitas tinggi mungkin lebih cenderung membayar retribusi sampah, karena mereka percaya bahwa ini adalah hal yang diharapkan dari mereka oleh masyarakat.

### **2.7.5. Teori Moralitas Situasional**

Teori ini berpendapat bahwa tidak ada tindakan moral yang absolut dan bahwa moralitas suatu tindakan tergantung pada konteksnya. Dalam konteks penelitian ini, teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa individu yang memiliki moralitas tinggi mungkin tidak selalu membayar retribusi sampah, tetapi mungkin mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kemampuan mereka untuk membayar atau kualitas layanan yang mereka terima.

## **2.8 Pembahasan *Willingness to Pay* (WTP) dan *Ability to Pay* (ATP)**

### **1. *Willingness to Pay* (WTP)**

Konsep *Willingness to Pay* (WTP) berfokus pada seberapa besar masyarakat bersedia membayar untuk layanan pengelolaan sampah yang mereka terima. Pendekatan ini membantu dalam mengidentifikasi sejauh mana masyarakat menghargai layanan tersebut dan seberapa besar mereka bersedia untuk berkontribusi secara finansial.

#### **Relevansi Moralitas:**

Faktor moralitas dapat mempengaruhi WTP masyarakat. Masyarakat dengan kesadaran moral tinggi, baik berdasarkan etika Kantian (kewajiban moral untuk mendukung kebersihan lingkungan) maupun utilitarianisme (keinginan untuk memaksimalkan kesejahteraan kolektif), cenderung memiliki WTP yang lebih tinggi. Moralitas dapat meningkatkan persepsi individu terhadap pentingnya retribusi sampah sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

#### **Penelitian Terkait :**

Studi menunjukkan bahwa nilai-nilai moral dan etika dapat mempengaruhi WTP masyarakat terhadap berbagai layanan publik, termasuk pengelolaan sampah. Penelitian ini mengukur bagaimana moralitas individu berkontribusi terhadap keinginan mereka untuk membayar retribusi sampah, dengan menggunakan skala Likert untuk menilai kesadaran dan nilai moral responden.

### **2. *Ability to Pay* (ATP)**

Konsep *Ability to Pay* (ATP) mengacu pada kemampuan individu atau rumah tangga dalam membayar retribusi sampah berdasarkan kondisi ekonomi

mereka. Dengan menggunakan pendekatan ATP, kita dapat menilai apakah tarif retribusi sampah yang dikenakan sesuai dengan daya beli masyarakat, terutama pada kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tarif yang ditetapkan tidak memberatkan golongan tertentu dan menghindari ketidakadilan dalam pembebanan biaya.

#### Relevansi Moralitas:

Sementara WTP berkaitan dengan keinginan berdasarkan nilai moral, ATP berkaitan dengan kemampuan ekonomi. Moralitas dapat mempengaruhi bagaimana individu memprioritaskan pengeluaran mereka. Misalnya, individu dengan pemahaman moral yang kuat mungkin akan mengalokasikan sebagian dari anggaran mereka untuk membayar retribusi sampah, meskipun mereka memiliki ATP yang terbatas. Namun, kemampuan untuk membayar tetap merupakan faktor penting yang dapat membatasi realisasi dari niat moral tersebut.

#### Penelitian Terkait:

Studi tentang ATP biasanya melibatkan analisis pendapatan rumah tangga, pengeluaran, dan prioritas keuangan. Dalam konteks ini, penelitian akan mengevaluasi bagaimana faktor moralitas dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan individu untuk memastikan mereka dapat dan bersedia membayar retribusi sampah.

Pembahasan mengenai WTP dan ATP dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami peran faktor moralitas dalam mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat Kota Bandung membayar retribusi sampah. WTP menunjukkan sejauh mana masyarakat bersedia membayar berdasarkan nilai moral mereka, sementara

ATP menunjukkan sejauh mana mereka mampu melakukannya secara finansial. Kedua konsep ini penting untuk merumuskan kebijakan yang efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran retribusi sampah, dengan mempertimbangkan baik nilai moral maupun kemampuan ekonomi mereka.

Dalam konteks retribusi, WTP (*Willingness to Pay*) dan ATP (*Ability to Pay*) merujuk pada dua konsep penting yang digunakan untuk menentukan sejauh mana masyarakat atau individu mampu dan bersedia membayar biaya retribusi yang dikenakan oleh pemerintah atau lembaga tertentu. WTP mengacu pada sejauh mana seseorang bersedia membayar suatu biaya atau tarif sebagai imbalan atas pelayanan atau fasilitas yang diterimanya. Ini lebih terkait dengan nilai subjektif atau persepsi penerima layanan terhadap manfaat yang mereka terima. Di sisi lain, ATP berfokus pada sejauh mana seseorang atau kelompok memiliki kemampuan finansial untuk membayar biaya tersebut. ATP sering kali dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti penghasilan, kekayaan, atau keadaan finansial individu. Dalam penyusunan kebijakan retribusi, kedua konsep ini harus dipertimbangkan untuk memastikan bahwa tarif yang dikenakan tidak membebani masyarakat, tetapi juga adil dan sebanding dengan pelayanan yang diberikan, serta sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat yang menjadi objek kebijakan tersebut.

### **2.8.1 *Willingness to Pay* (WTP)**

Teori *Willingness to Pay* (WTP) dalam konteks retribusi sampah merujuk pada sejauh mana individu atau rumah tangga bersedia membayar untuk memperoleh layanan pengelolaan sampah yang efisien dan berkelanjutan. WTP sering digunakan untuk mengukur nilai yang dirasakan masyarakat terhadap suatu

layanan publik, dalam hal ini adalah pengelolaan sampah. Secara aktual, WTP berkaitan erat dengan faktor-faktor seperti kesadaran lingkungan, tingkat kenyamanan dengan layanan yang diberikan, serta manfaat yang dirasakan dari pengelolaan sampah yang baik. Masyarakat yang memiliki pemahaman lebih dalam tentang dampak negatif sampah terhadap lingkungan, seperti pencemaran dan perubahan iklim, cenderung menunjukkan WTP yang lebih tinggi untuk mendukung kebijakan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selain itu, WTP juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, di mana masyarakat dengan penghasilan lebih tinggi biasanya lebih bersedia membayar biaya retribusi sampah yang lebih besar. Di sisi lain, pemerintah perlu memperhatikan aspek sosial-ekonomi dalam menentukan tarif retribusi, agar tarif tersebut tetap adil dan tidak membebani masyarakat dengan penghasilan rendah. Implementasi WTP dalam retribusi sampah juga dapat mencakup pendekatan diferensiasi tarif berdasarkan jenis layanan dan tingkat kebersihan yang diinginkan, dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang WTP sangat penting untuk merancang kebijakan retribusi sampah yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan serta harapan masyarakat.

### **2.8.2 Ability to Pay (ATP)**

Dalam konteks retribusi sampah, masalah terkait ability to pay (kemampuan untuk membayar) sering kali menjadi tantangan besar, terutama bagi kelompok masyarakat dengan penghasilan rendah. Kemampuan untuk membayar ini mencerminkan seberapa besar daya beli masyarakat terhadap biaya retribusi yang

ditetapkan oleh pemerintah atau penyedia layanan sampah. Di banyak daerah, tarif retribusi sampah yang terlalu tinggi dapat membebani kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah, yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk membayar dan, pada gilirannya, menurunkan partisipasi mereka dalam program pengelolaan sampah yang telah dirancang. Hal ini bisa menyebabkan masalah sosial, seperti pengelolaan sampah yang buruk, karena masyarakat yang tidak membayar retribusi seringkali tidak mendapatkan layanan pengangkutan atau pembuangan sampah yang memadai, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan. Selain itu, ketidakmampuan untuk membayar juga dapat memicu ketidaksetaraan dalam kualitas layanan antara kelompok masyarakat yang lebih mampu dan yang kurang mampu. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan pendekatan berbasis kemampuan untuk membayar saat merancang tarif retribusi sampah, misalnya dengan menerapkan subsidi untuk kelompok berpendapatan rendah atau menggunakan sistem tarif progresif yang mengakomodasi perbedaan daya beli di masyarakat. Pendekatan ini penting untuk memastikan keberlanjutan sistem pengelolaan sampah yang inklusif dan adil.

## **2.9 Strategi Peningkatan Restribusi Sampah**

Strategi Peningkatan Retribusi Sampah di Kota Bandung Berdasarkan Faktor Moralitas.

### **1. Edukasi dan Kesadaran Moral**

Kampanye Publik: Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kebersihan lingkungan melalui kampanye media sosial, seminar, dan lokakarya.

Pendidikan Sekolah: Mengintegrasikan pendidikan moral dan lingkungan dalam kurikulum sekolah untuk membentuk kesadaran sejak dini.

## 2. Insentif dan Penghargaan

Penghargaan Komunitas: Memberikan penghargaan kepada komunitas atau individu yang berkontribusi signifikan dalam pembayaran retribusi sampah.

Insentif Keuangan: Menyediakan diskon atau insentif finansial bagi mereka yang rutin membayar retribusi sampah tepat waktu.

## 3. Transparansi dan Akuntabilitas

Laporan Keuangan Publik: Memastikan transparansi dalam penggunaan dana retribusi sampah melalui laporan publik yang rutin. *Feedback* Masyarakat: Membuka saluran komunikasi untuk umpan balik dari masyarakat mengenai pengelolaan sampah dan retribusi.

## 4. Penerapan Hukum dan Regulasi

Penegakan Hukum: Menegakkan regulasi pembayaran retribusi sampah dengan sanksi bagi yang tidak patuh.

Kerjasama dengan Pemerintah Lokal: Memperkuat kerjasama antara pemerintah lokal dan komunitas untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan retribusi sampah.

## 5. Teknologi dan Inovasi

Aplikasi Pembayaran: Mengembangkan aplikasi yang memudahkan pembayaran retribusi sampah secara online.

Sistem Monitoring: Menggunakan teknologi untuk memonitor pembayaran dan pengelolaan sampah secara efisien.

Dengan pendekatan ini, diharapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi sampah akan meningkat, sehingga membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat di Kota Bandung.

## **2.10 Teori Pendapatan**

Teori pendapatan merupakan salah satu aspek penting dalam penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan masyarakat untuk membayar retribusi sampah. Pendapatan individu atau rumah tangga seringkali berhubungan langsung dengan kemampuan dan keinginan mereka untuk membayar berbagai jenis pajak dan retribusi, termasuk retribusi sampah.

### **1. Pendapatan sebagai Faktor Ekonomi :**

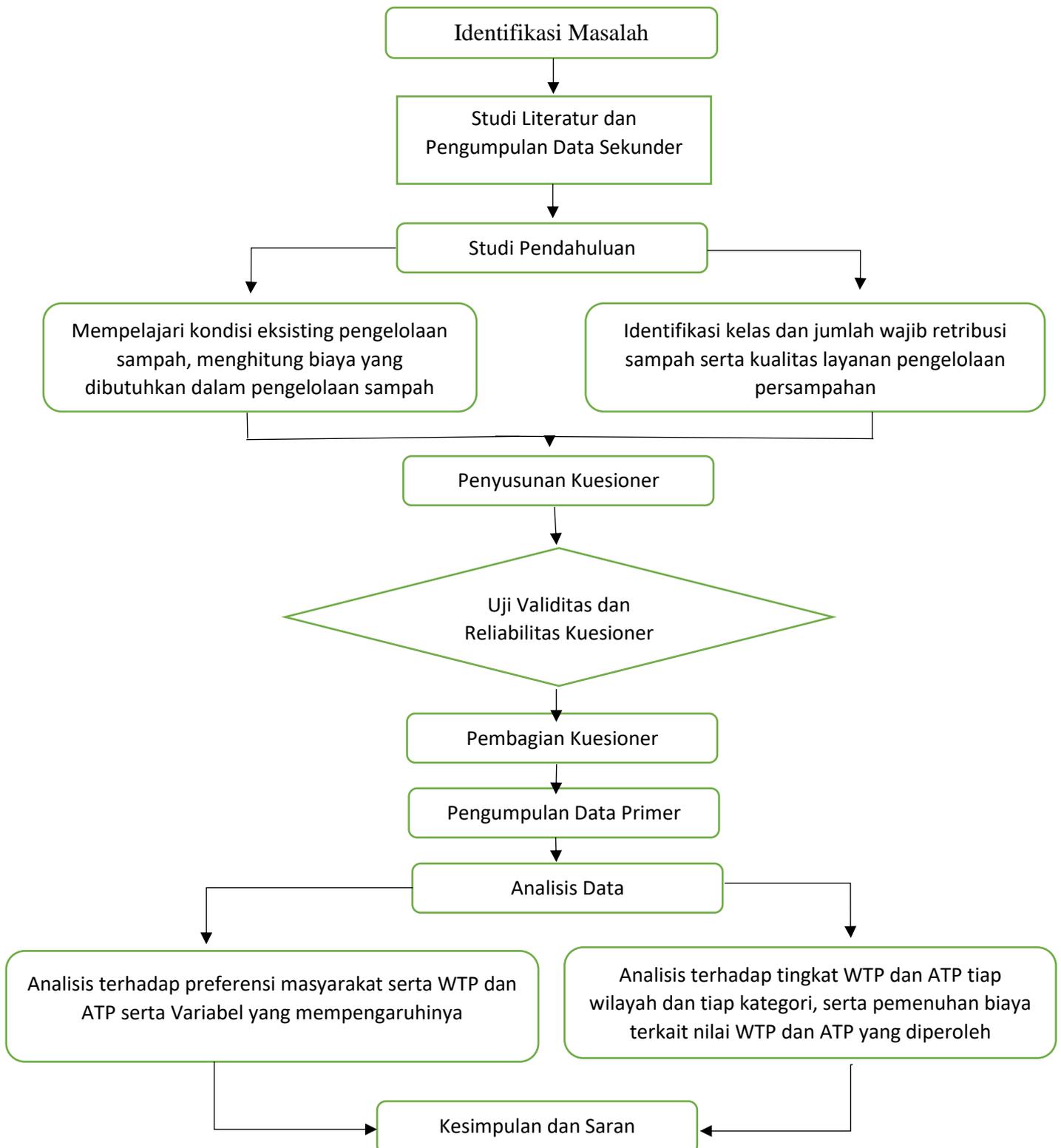
Pendapatan mempengaruhi daya beli dan alokasi anggaran rumah tangga. Masyarakat dengan pendapatan lebih tinggi cenderung memiliki alokasi anggaran yang lebih fleksibel untuk pembayaran retribusi sampah dibandingkan mereka yang berpendapatan rendah. Hal ini menandakan bahwa keinginan untuk membayar retribusi sampah dapat meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan.

### **2. Implikasi Kebijakan**

Pemerintah Kota Bandung dapat mempertimbangkan faktor pendapatan dalam menetapkan kebijakan retribusi sampah. Misalnya, memberikan subsidi atau skema pembayaran yang fleksibel untuk rumah tangga berpendapatan rendah dapat meningkatkan kepatuhan dan partisipasi dalam membayar retribusi sampah. Selain itu, kampanye kesadaran dan edukasi mengenai

pentingnya kebersihan lingkungan perlu terus digalakkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat lintas kelompok pendapatan.

**Tabel 2.1 Kerangka Pemikiran**



## **2.11 Hipotesis**

Hipotesis merupakan salah satu dugaan atau jawaban sementara terkait dengan permasalahan yang penulis kaji yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis pada penelitian ini yaitu sejauh mana Masyarakat Kota Bandung memiliki keinginan yang beragam dalam membayar retribusi sampah, namun hipotesis ini menunjukkan bahwa faktor moralitas merupakan salah satu penentu utama dalam memengaruhi keinginan tersebut. Masyarakat yang memiliki kesadaran moralitas tinggi, yaitu kesadaran akan tanggung jawab sosial dan kepatuhan terhadap peraturan, akan lebih cenderung membayar retribusi sampah.

Kesadaran moralitas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti peniruan perilaku yang baik dari orang tua dan komunitas, serta pengaruh lingkungan sekitar. Masyarakat yang tumbuh dalam lingkungan yang mengedepankan nilai-nilai moral akan lebih mungkin memiliki keinginan untuk membayar retribusi sampah. Selain itu, persepsi tentang tanggung jawab sosial juga memainkan peran penting. Masyarakat yang melihat pembayaran retribusi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka akan lebih cenderung untuk melakukannya.

Hipotesis ini dapat diuji melalui survei dan wawancara dengan masyarakat Kota Bandung. Dengan menganalisis data dari survei tersebut, dapat diketahui hubungan antara kesadaran moralitas, kepatuhan terhadap peraturan, dan persepsi tanggung jawab sosial dengan keinginan membayar retribusi sampah.

Dengan demikian hipotesis ini dapat membantu memahami lebih dalam mengapa masyarakat Kota Bandung memiliki tingkat keinginan membayar retribusi sampah yang beragam dan bagaimana strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar retribusi sampah.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa faktor moralitas memiliki pengaruh signifikan terhadap keinginan masyarakat Kota Bandung untuk membayar retribusi sampah. Semakin tinggi kesadaran sosial masyarakat mengenai dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan, semakin besar kemungkinan mereka untuk merasa bertanggung jawab secara moral dalam membayar retribusi tersebut.

Selain itu, norma dan nilai budaya yang mendukung kepentingan kolektif, seperti gotong royong, juga berperan dalam meningkatkan niat masyarakat untuk memenuhi kewajiban ini. Kepercayaan terhadap pemerintah dalam pengelolaan dana retribusi dan pengaruh lingkungan sosial, seperti keluarga dan teman, turut mempengaruhi sikap masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor moralitas tersebut berkontribusi secara positif terhadap keinginan masyarakat untuk membayar retribusi sampah di Kota Bandung.

## 2.13 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Variabel</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
<b>1.</b>	Yuli Arnita dan Nur Aidar (2018). “Analisis <i>Willingness to Pay</i> Masyarakat untuk Peningkatan Pengelolaan Sampah di Kota Banda Aceh”.	Pendapatan, Pendidikan, Usia	<i>Contigen Valuation Method (CVM)</i> dan Regresi linier Berganda.	Besaran rata-rata yang bersedia dibayarkan masyarakat Banda Aceh yaitu sebesar Rp 17.067/bulan untuk peningkatan pengelolaan sampah. Variabel pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap WTP, sedangkan variabel Pendidikan, pekerjaan, usia berpengaruh positif tetapi tidak signifikan (Arnita & Aidar, 2018)
<b>2.</b>	Yulianto Mokodompis, Markus Kaunang, dan Ventje Kasenda (2019). “Implementasi Kebijakan di Kota Bandung dengan Metodologi Kualitatif”.	Implementasi kebijakan pengelolaan sampah, kesadaran masyarakat, dan efektivitas pengelolaan sampah.	Penelitian kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandung telah berjalan dengan baik, tetapi masih mengalami kendala karena kesadaran masyarakat untuk memahami setiap aturan dalam kebijakan pengelolaan sampah.

	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Variabel</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
3.	Rian Anggara, (2018). “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kesiediaan Membayar Restribusi Sampah pada Masyarakat Kota Bandung”.	Kesiediaan membayar Restribusi Sampah, Kesadaran Lingkungan, Kepercayaan terhadap Pemerintah, Kualitas layanan persampahan dan Faktor Ekonomi.	Kuantitatif, dengan survey terhadap 384 respomden.	Hasil dari penelitian adalah keterikatan komunitas berpengaruh positif terhadap kesiediaan membayar restribusi sampah. Kpercayaan terhadap pemerintah, dan kesadaran lingkungan tidsak berpengaruh signifikan terhadap kesiediaan membayar restribusi sampah. Faktor ekonomi berpengaruh negatif terhadap kesiediaan membayar restrbusi sampah.
4.	Muhammad Faathir Alhakam dan Iwan Juwana. . (2019). “ <i>Analisis Willingness to Pay</i> Masyarakat Kelurahan Antapani Tengah Menuju Optimalisasi TPS3R”.	Jenis Kelamin, usia, pendapatan, tingkat Pendidikan, pekerjaan, jumlah orang, restribusi sampah.	<i>Contigen Valuation Method (CVM)</i> dan Regresi linier Berganda.	Besaran WTP yang bersedia dibayarkan sebesar Rp 16.079/bulan dan rata-ratanya sebesar Rp 7.163/bulan. Hasil yang didapatkan menunjukkan variabel tingkat Pendidikan dan biaya retribusi sampah berpengaruh dan signifikan, sedangkan variabel lainnya seperti jenis kelamin, usia, pekerjaan dan jumlah orang berpengaruh dan tidak signifikan (Alhakam & Juwana, 2019).

	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Variabel</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
5.	Kofi Sekyere Boateng, Peter AgyeiBaffour, Daniel Boateng, George Nana Kwasi Rockson, Kofi Akohene Mensah, dan Anthony Kwaku Edusei. (2019). <i>“Household Willingnessto-Pay for Improved Solid Waste Management Services in Four Major Metropolitan Cities in Ghana”</i> .	Jenis kelamin, umur, pendidikan, pendapatan, jumlah anggota keluarga, kepuasan terhadap pembersihan sampah, dan harga maksimum sampah.	<i>Contigen Valuation Method (CVM)</i> dan Regresi logit dan probit.	Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa responden rumah tangga bersedia membayar Rs 24 (US\$ 0,34) untuk lingkungan yang bersih di daerah semi-perkotaan. Studi ini juga menemukan lebih dari 95% responden rumah tangga bersedia membayar untuk pengelolaan sampah di Madurai. hasil logit untuk variabel-variabel yang secara signifikan berhubungan dengan probabilitas memberikan nilai WTP positif. Sedangkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, jumlah keluarga, sistem pengelolaan sampah saat ini tidak terpenuhi, dan usia, tingkat pendidikan dan kesediaan membayar maksimum negatif (Balasubramanian, 2019).
6.	Selamawit Mulat, Walelegn Worku, dan Amare Minyihun,(2019).	jenis kelamin, usia, jenis pekerjaan, pendidikan, jumlah sampah yang	<i>Contigent Valuation Method (CVM)</i> .	Hasil perhitungannya menunjukkan bahwa 81,06% bersedia membayar untuk layanan tersebut. Jumlah rata-rata uang yang bersedia dibayarkan oleh peserta per bulan adalah 29,7

	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Variabel</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
	<i>“Willingness to pay for improved solid waste management and associated factors among households in Injibara town, Northwest Ethiopi”.</i>	dihasilkan, status perkawinan, agama, jumlah anggota keluarga, jarak ke tempat pembuangan sampah, kepuasan terhadap pelayanan, status keadaan		ETB (\$ 1,07)). Penelitian mengungkapkan bahwa seluruh variabel bebas berpengaruh dan signifikan secara statistik terhadap kesediaan membayar (Mulat et al., 2019).
7.	Richardson Kojo Edeme dan Chogozie Nelson Nkalu.(2020). <i>“Household preferences and willingness to pay for waste management service in Nsukka Urban Area”.</i>	Usia, Jenis kelamin, status perkawinan, jumlah anggota keluarga, pendidikan, permintaan akan pengelolaan sampah, pendapatan, status kepemilikan rumah, biaya pengelolaan sampah, permintaan akan jasa	<i>Ordinary last square</i> (OLS), dengan model regresi probit.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor demografi seperti usia, ukuran rumah tangga dan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemauan rumah tangga untuk menuntut pengelolaan sampah di wilayah perkotaan Nsukka. Jenis kelamin. Pendidikan, jumlah anggota keluarga berpengaruh positif. Umur dan status perkawinan berpengaruh negatif (Edeme & Nkalu, 2020).

	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Variabel</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
		pengelolaan sampah dan kesadaran tentang implikasi lingkungan dari pelayanan pengelolaan sampah.		
<b>8.</b>	Muniyandi Balasubramanian,(2019). <i>“Household Willingness to Pay for Improved Solid Waste Management Services: Using Contingent Valuation Analysis in India”</i> .	Jenis kelamin, umur, pendidikan, pendapatan, jumlah anggota keluarga, kepuasan terhadap pembersihan sampah, dan harga maksimum sampah.	<i>Contigent Valuation Method (CVM)</i> , model regresi logit dan probit.	Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa responden rumah tangga bersedia membayar Rs 24 (US\$ 0,34) untuk lingkungan yang bersih di daerah semi-perkotaan. Studi ini juga menemukan lebih dari 95% responden rumah tangga bersedia membayar untuk pengelolaan sampah di Madurai. hasil logit untuk variabel-variabel yang secara signifikan berhubungan dengan probabilitas memberikan nilai WTP positif. Sedangkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, jumlah keluarga, sistem pengelolaan sampah saat ini tidak terpenuhi, dan usia, tingkat pendidikan dan kesediaan membayar maksimum negatif.
<b>9.</b>	Lukman Hakim, (2020).	tingkat pendidikan, pendapatan bulanan,	model regresi dan model <i>Collective Ac-tion (CA)</i> .	Hasil penelitian menunjukkan masyarakat bersepakat membayar Rp 2.000/minggu. Tingkat pasrtisipasi

	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Variabel</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
	“Penanganan Sampah Secara Partisipatif di Desa Salut Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat”.	retribusi sampah, manfaat yang dirasakan.		masyarakat dalam penanganan sampah sebesar 60.5%. faktor yang mempengaruhi kesediaan membayar masyarakat yaitu manfaat yang dirasakan oleh warga (Hakim, 2020).
<b>10.</b>	Grcae Dharmawati Timang dan Ihwan Tjoli, Ludia T. Wambrau. (2019). “Persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah dan kesediaan membayar ( <i>willingness to pay</i> ) dalam pelayanan pengelolaan sampah di Distrik Manokwari Barat”.	persepsi responden terhadap pengelolaan sampah, jumlah tanggungan keluarga, tingkat pendapatan, tingkat Pendidikan.	<i>Contigen Valuation Method</i> (CVM) dan Regresi linier berganda.	Besaran rata-rata WTP adalah sebesar Rp. 68.333. pengaruh secara simultan maupun pasrial menunjukkan semua variabel berpengaruh secara signifikan terhadap kesediaan membayar masyarakat (Timang & Tjoli, 2019).

	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Variabel</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
<b>11.</b>	Nurul Huda (2018). “Pengaruh Kesadaran Lingkungan Terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Retribusi Sampah di Kota Bandung”.	Tingkat pendidikan, pendapatan bulanan, usia, kesadaran tentang implikasi lingkungan dari pelayanan pengelolaan sampah.	Kuantitatif, dengan survey terhadap 3126 responden.	Kesadaran lingkungan yang tinggi di kalangan warga Bandung secara signifikan mempengaruhi keinginan mereka membayar retribusi sampah. Warga yang memiliki kesadaran lingkungan cenderung merasa berkewajiban secara moral untuk mendukung kebijakan pengelolaan sampah melalui pembayaran retribusi.
<b>12.</b>	Muhammad Ibrahim Sahupala, (2019). “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya”.	Implementasi kebijakan pengelolaan sampah, komunikasi dengan masyarakat, koordinasi dengan instansi lain, pengawasan dan fasilitas sarana prasarana.	Penelitian Kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup telah dilaksanakan dengan komunikasi terbuka dengan masyarakat, koordinasi dengan instansi lain, pengawasan dan fasilitas sarana prasarana yang cukup untuk mengelola sampah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk memahami faktor moralitas yang mempengaruhi keinginan masyarakat Kota Bandung retribusi sampah. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai variabel-variabel dalam penelitian. Variabel yang diteliti adalah Pendidikan (PDKN), Penghasilan (PGSN), Keterlibatan Masyarakat (KTBM), dan Kondisi Lingkungan (KDLN) sebagai variabel independent serta Keinginan dan Kemauan Membayar Retribusi sampah (KMRS) sebagai variabel dependen.

Hasil data digambarkan dengan memperlihatkan nilai-nilai berupa nilai rata-rata (*mean*), nilai tertinggi (*maximum*), nilai terendah (*minimum*), dan standar deviasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi lengkap tentang bagaimana moralitas mempengaruhi keinginan masyarakat Kota Bandung retribusi sampah.

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan analisis verifikatif, untuk mengetahui, pengaruh Pendidikan, penghasilan, keterlibatan masyarakat, dan kondisi lingkungan terhadap moralitas keinginan masyarakat membayar retribusi sampah.

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif untuk menggambarkan kondisi moralitas keinginan masyarakat membayar retribusi sampah di Kota Bandung, seperti Pendidikan, penghasilan, keterlibatan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Data ini akan diolah untuk mendapatkan gambaran umum tentang kondisi moralitas masyarakat dan karakteristik tiap variabel. Serta penelitian ini akan melakukan analisis statistik verifikatif untuk menguji hipotesis tentang pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap moralitas masyarakat. Analisis

ini bertujuan untuk memverifikasi hubungan sebab-akibat antara variabel *independent* (Pendidikan, penghasilan, keterlibatan masyarakat, dan kondisi lingkungan).

Faktor-faktor yang memiliki hubungan signifikan antara variabel terikat (*dependent*) dan variabel bebas (*independent*) data didapatkan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung, menggunakan perhitungan regresi data logit multinomial WTP (MLWTP). Variabel-variabel yang diteliti pada penelitian ini yaitu :

a. Variabel terikat (*dependent*) yang diteliti adalah :

- **KMRS** : Keinginan dan Kemauan Membayar Retribusi Sampah (Y)

b. Variabel bebas (*independent*) yang diteliti adalah :

- **PDKN** : Pendidikan (X1)
- **PGSN** : Penghasilan (X2)
- **KTBM** : Keterlibatan Masyarakat (X3)
- **KDLN** : Kondisi Lingkungan (X4)

Jenis ini berfokus pada pengumpulan data kuantitatif yang berupa angka dan analisis data menggunakan statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

### **3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian dengan tujuan mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Adapun lokasi pada penelitian ini yaitu Kecamatan Bandung Wetan, Coblong dan Panyileukan.

#### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dimulai pada minggu ke-3 bulan April dan membutuhkan waktu kurang lebih selama tujuh bulan.

### **3.4 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah bagaimana moralitas mempengaruhi keinginan masyarakat Kota Bandung membayar restribusi sampah. Didalam penelitian ini juga dibutuhkan beberapa data mengenai sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana moralitas masyarakat Kota Bandung mempengaruhi kesadaran mereka membayar restribusi sampah.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi moralitas masyarakat Kota Bandung membayar restribusi sampah, seperti pengaruh lingkungan, sosial dan ekonomi.
3. Mengetahui bagaimana peran pemerintah Kota Bandung mempengaruhi moralitas masyarakat membayar restribusi sampah.

### **3.5 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data pada penelitian ini yaitu data deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah mendeskripsikan, meneliti, dan menjelaskan sesuatu yang dipelajari apa adanya, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang dapat diamati dengan menggunakan angka-angka. Dalam penelitian menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan sekunder.

#### **1. Data Primer**

Data primer biasanya disebut sebagai data mentah atau informasi dari tangan pertama dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Pengumpulan data primer dilakukan langsung oleh peneliti sendiri oleh karena itu data ini dapat memberikan informasi yang lebih rinci. Pada penelitian ini teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan langsung menuju lokasi penelitian yaitu bertempat Kelurahan Tamansari, Citarum dan Cihapit.

#### **2. Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan sebagai data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Data sekunder yaitu sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan. Data sekunder pada penelitian ini didapat dari website atau media sosial baik berupa data angka maupun dokumentasi.

### **3.6 Metode Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini didasarkan pada data yang bersifat kuantitatif yaitu data berupa angka-angka yang telah di konversi dari kuesioner yang sudah dirancang dalam sedemikian rupa untuk mendukung apa saja yang diperlukan dalam penelitian ini. Metode Analisis data dalam penelitian menggunakan metode analisis Regresi Logistik (*Logistic Regression Model*). Regresi Logistik Menurut Kuncoro (2004), model Regresi Logistik lebih fleksibel dibandingkan teknik yang lain. Beberapa kelebihanannya antara lain :

- a. Variabel bebas dalam regresi logistik bisa campuran dari variabel kontinu, diskrit, dan dikotomis
  - Variabel Kontinu

Variabel kontinu adalah variabel yang dapat mengambil nilai dalam rentang tertentu, termasuk angka pecahan. Contoh variabel kontinu adalah tinggi badan, berat badan, suhu, dan waktu. Variabel ini dapat diukur dengan tingkat presisi yang berbeda-beda, sehingga memungkinkan untuk nilai-nilai yang sangat mendekati satu sama lain, seperti 1.5, 1.55, atau 1.555.
  - Variabel Diskrit

Variabel diskrit adalah variabel yang hanya dapat mengambil nilai tertentu, biasanya dalam bentuk bilangan bulat. Contoh variabel diskrit adalah jumlah anak, jumlah mobil, atau jumlah pasien di rumah sakit. Nilai-nilai variabel ini terputus dan tidak dapat berupa pecahan, misalnya, tidak mungkin ada 2.5 anak.
  - Variabel Dikotomis

Variabel dikotomis, juga dikenal sebagai variabel biner, adalah variabel yang hanya memiliki dua kategori atau nilai. Contoh variabel dikotomis adalah jenis kelamin (pria atau wanita), status pernikahan (menikah atau belum menikah), atau keberadaan (ada atau tidak ada). Variabel ini sering digunakan dalam analisis untuk membedakan antara dua kelompok atau kondisi yang berbeda.

Memahami perbedaan antara ketiga jenis variabel ini penting dalam analisis data, karena masing-masing memiliki karakteristik dan metode analisis yang berbeda.

- b. Regresi Logistik amat bermanfaat digunakan apabila distribusi respon atas variabel terikat diharapkan *non-linear* dengan salah satu atau lebih variabel bebas.

Analisis regresi logistik digunakan dengan tujuan untuk mengetahui probabilitas variabel dependen dapat diprediksi atau dipengaruhi oleh variabel independent.

### **3.7 Uji Keabsahan Data**

Setelah pengumpulan data dibutuhkan uji keabsahan data dengan tujuan dapat meningkatkan validitas dan kredibilitas pada penelitian. Metode keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode *Contigent valuation methode* (CVM). Metode pendekatan CVM yaitu salah satu di antara banyak teknik yang telah dikembangkan oleh para ahli ekonomi untuk menetapkan harga untuk barang dan jasa lingkungan. Metode CVM adalah metode survei yang digunakan untuk memperoleh penilaian konsumen terhadap barang dan jasa tidak dijual di pasar, dengan menunjukkan kesediaan mereka untuk membayar (Sizya, 2015). Metode ini telah secara luas digunakan dalam penilaian sumber daya non-pasarr seperti rekreasi, satwa liar dan kualitas lingkungan.

### **3.8 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan proses dalam mengkaji, memaparkan, menjelaskan dan menyajikan hasil yang diperoleh dari pengumpulan data baik melalui wawancara, observasi

maupun dokumentasi. Ketepatan dan keakuratan data yang sudah terkumpul sangat diperlukan, terutama dikarenakan sumber informasi yang berbeda akan memberikan informasi yang berbeda-beda. Maka dari itu analisis data sangat diperlukan dalam penelitian kuantitatif.

Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini yaitu teknik analisis data interaktif. Menurut Miles dan Huberman memaparkan bahwa teknik analisis data interaktif adalah teknik analisis data yang terdiri atas empat komponen proses analisis, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan.

### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan topik penelitian sehingga pada akhirnya memberikan gambaran jelas dan kesimpulan akhir dapat digambarkan. Hal pertama yang dapat dilakukan dalam reduksi data adalah dengan memfokuskan pada hal-hal pokok dengan mengesampingkan hal-hal yang dianggap kurang valid.

### 2. Penyajian Data

Langkah berikutnya setelah mereduksi data adalah dengan menyajikan data. Dalam penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, *table*, grafik, *flowschart*, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut akan dapat lebih terorganisasikan, sehingga akan membantu peneliti memahami apa yang terjadi dan dapat memudahkan untuk menganalisis lanjutan mengenai Faktor Moralitas Keinginan Masyarakat Kota Bandung Membayar Restribusi Sampah.

Pada penelitian ini tahap penyajian data dalam menentukan strategi pengembangan menggunakan analisis SWOT. Faktor-faktor yang diperoleh akan ditampilkan dengan menggunakan tabel sehingga mudah dibaca dan dipahami. Adapun tahapan dalam penyajian data yang dilakukan yaitu, sebagai berikut:

a. Tahapan pertama dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT (*Strenght, Weakness, Opportunity* dan *Thread*) dengan melihat berapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada di kawasan kecamatan Bandung Wetan.

b. Tahapan kedua yaitu dilakukan dengan menggunakan *matriks Internal Factors Analysis (IFE)* dan *External Factors Analysis (EFA)*, IFE mengkaji faktor-faktor internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan dari potensi yang ada di kecamatan Bandung Wetan, sedangkan EFA mengkaji faktor faktor dari luar yang meliputi ancaman dan peluang yang akan dihadapi oleh kecamatan Bandung Wetan.

### 3. Penarikan Simpulan

Penarikan simpulan dilakukan setelah semua proses dilakukan. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat berupa temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran baru suatu strategi peningkatan redistribusi sampah di kecamatan Bandung Wetan, Coblong, dan Panyileukan.

### **3.9 Analisis Regresi Logistik**

Analisis regresi logit multinomial adalah teknik statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara variabel dependen kategori dengan lebih dari dua kategori dan satu atau lebih variabel independen. Metode ini sangat berguna dalam berbagai bidang, seperti pemasaran, kesehatan, dan ilmu sosial, di mana keputusan atau pilihan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Dalam regresi logit multinomial, satu kategori dipilih sebagai

kategori referensi, dan model ini mengestimasi log-odds dari setiap kategori dibandingkan dengan kategori referensi. Proses ini melibatkan estimasi parameter menggunakan metode maksimum likelihood, yang memungkinkan peneliti untuk memperkirakan pengaruh variabel independen terhadap probabilitas terjadinya setiap kategori. Hasil dari model ini dapat diinterpretasikan melalui koefisien yang menunjukkan perubahan log-odds untuk setiap unit perubahan pada variabel independen.

Selain itu, analisis ini juga menyediakan cara untuk menghitung probabilitas untuk masing-masing kategori, yang memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang preferensi individu. Uji kecocokan model, seperti uji Likelihood Ratio atau Hosmer-Lemeshow, penting untuk memastikan bahwa model tersebut dapat diandalkan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali faktor-faktor yang memengaruhi keputusan individu dan mengaplikasikan wawasan tersebut untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam konteks praktis. Rumus model yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\log \left( \frac{P(Y = 1/X)}{P(Y = 0/X)} \right) = \beta_{0\kappa} + \beta_{1\kappa} X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_{\rho\kappa} X_\rho$$

Keterangan :

- $P(Y = 1/X)$  : Probabilitas bahwa variabel dependen Y bernilai 1 (kejadian positif) diberikan variabel independent X
- $P(Y = 0/X)$  : Probabilitas bahwa variabel dependen Y bernilai 0 (kejadian negatif) diberikan variabel independent X
- $\frac{P(Y=1/X)}{P(Y=0/X)}$  : Rasio odds, yaitu perbandingan antara probabilitas kejadian positif dan probabilitas kejadian negatif.
- $\log$  : Fungsi logaritma natural yang digunakan untuk mengubah rasio odds menjadi skala log-odds, memungkinkan analisis yang lebih mudah.

- $\beta_0$  : *Intercept* atau konstanta model, yang menunjukkan nilai log-odds ketika semua variabel independent  $X$  bernilai nol.
- $\beta_{1\kappa}, \beta_2, \dots, \beta_p$  : Koefisien regresi untuk masing-masing variabel independent  $X_1, X_2, \dots, X_p$ . Koefisien ini menunjukkan seberapa besar pengaruh masing-masing variabel terhadap log-odds dari kejadian positif.
- $X_1, X_2, \dots, X_p$  : Variabel independent yang mempengaruhi probabilitas kejadian  $Y$ .

Di sini,  $P(Y = \kappa/X)$  adalah probabilitas memilih kategori  $\kappa$  yang terkait dengan WTP, sedangkan  $K$  adalah kategori referensi. Dalam proses estimasi, koefisien  $\beta$  diestimasi untuk setiap kategori dengan mempertimbangkan variabel independent yang berpengaruh. Melalui iterasi, MLE mencari nilai parameter yang paling sesuai menjelaskan data, sehingga menghasilkan model yang dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas memilih kategori tertentu.

Hasil estimasi ini kemudian digunakan untuk menginterpretasikan pengaruh berbagai faktor terhadap keputusan WTP, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang signifikan dalam mempengaruhi preferensi individu. Dengan demikian, model estimasi dalam regresi logit multinomial memberikan alat yang kuat untuk menganalisis dinamika pemilihan dalam konteks ekonomi dan kebijakan.

### 3.9.1 Menilai Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)

Uji overall model fit dilakukan untuk mengetahui apakah model yang digunakan fit dengan data observasi atau tidak. Uji ini dapat diketahui melalui hasil uji regresi logistik, yaitu pada nilai Sum Squared Residual. Apabila nilai Sum Squared Residual menunjukkan nilai yang positif, maka dapat disimpulkan bahwa model telah cocok dengan data (Ghozali, 2011).

1)  $H_0$  : Model fit dengan data

2)  $H_a$  : Model tidak fit dengan data

Rumus model yang digunakan sebagai berikut :

$$R^2_{McFadden} = 1 - \frac{L_m}{L_0}$$

Keterangan :

- $L_m$  adalah *likelihood* model yang diestimasi
- $L_0$  adalah *likelihood* model tanpa variabel independent (model dasar)

### 3.9.2 Uji *Likelihood Ratio (LR Test)*

Uji ini membandingkan model penuh dengan model yang lebih sederhana (null model) untuk melihat apakah penambahan variabel independen secara signifikan meningkatkan kecocokan model.

$$LR = -2 \cdot (\log L_0 - \log L_M)$$

Keterangan :

- LR : Nilai yang lebih tinggi menunjukkan bahwa model penuh secara signifikan lebih baik dalam menjelaskan data dibandingkan model nol.
- $L_0$  : *likelihood* dari mode nol
- $L_M$  : *likelihood* dari mode penuh

Statistik LR ini mengikuti distribusi chi-square dengan derajat bebas yang sama dengan jumlah variabel independen dalam model.

### 3.9.3 Kelayakan Model (*Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*)

Uji Hosmer-Lemeshow adalah metode yang digunakan untuk menilai kecocokan model dalam analisis regresi logit, termasuk regresi logit multinomial. Uji ini bertujuan untuk menguji hipotesis nol yang menyatakan bahwa model yang diusulkan sesuai dengan data yang diamati. Proses uji dimulai dengan membagi data menjadi beberapa kelompok berdasarkan probabilitas

prediksi dari model. Untuk setiap kelompok, dihitung jumlah kejadian yang diharapkan ( $E_i$ ) dan jumlah kejadian yang diamati ( $O_i$ ). Statistik uji Hosmer-Lemeshow dihitung dengan rumus:

$$H = \sum_{i=1}^g \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

Keterangan :

- $H$  : Statistik uji Hosmer-Lemeshow, yang menunjukkan sejauh mana model memprediksi data dengan baik.
- $g$  : Jumlah kelompok yang dibentuk berdasarkan probabilitas prediksi dari model.
- $O_i$  : Jumlah kejadian yang diamati (observed) dalam kelompok ke-i. Ini adalah data aktual yang kita miliki.
- $E_i$  : Jumlah kejadian yang diharapkan (expected) berdasarkan model dalam kelompok ke-i. Ini adalah nilai yang diprediksi oleh model untuk kelompok tersebut.

di mana  $g$  adalah jumlah kelompok. Nilai statistik  $H$  kemudian dibandingkan dengan distribusi chi-square dengan derajat bebas  $g-2$  untuk menentukan apakah terdapat kecocokan yang signifikan antara model dan data. Jika nilai  $p$  dari statistik uji lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan (misalnya, 0,05), maka tidak ada cukup bukti untuk menolak hipotesis nol, yang menunjukkan bahwa model dianggap cocok. Sebaliknya, nilai  $p$  yang rendah menunjukkan bahwa model tidak cocok dengan data, yang dapat memicu perlunya modifikasi model. Dengan demikian, uji Hosmer-Lemeshow berfungsi sebagai alat penting

dalam validasi model regresi logit, memastikan bahwa hasil analisis dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan berbasis data.

### 3.9.4 Koefisien Determinasi (*McFadden R-Squared*)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. McFadden R-squared merupakan ukuran yang mencoba meniru ukuran  $R^2$  pada multiple regression. Dimana McFadden R-squared memiliki nilai antara 0 dan 1 dan apabila nilai tersebut semakin mendekati angka 1, maka dapat disimpulkan bahwa variasi variabel independen semakin sempurna dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Namun uji koefisien determinasi dengan McFadden R-squared pada aplikasi eviews memiliki nilai yang 76 lebih rendah dibandingkan dengan uji yang serupa pada aplikasi lain. Sehingga nilai McFadden R-squared pada rentang 0,2 hingga 0,4 menunjukkan bahwa model yang digunakan sudah sangat bagus (Zaidi dan Amirat, 2016).

- 1)  $H_0$  : Mcfadden dapat diterima
- 2)  $H_a$  : Mcfadden tidak dapat diterima

Rumus model yang digunakan sebagai berikut :

$$R^2_{McFadden} = 1 - \frac{Lm}{L0}$$

Keterangan :

- Lm adalah *likelihood* model yang diestimasi
- L0 adalah *likelihood* model tanpa variabel independent (model dasar)

### 3.9.5 Uji Akurasi Model

Pengujian akurasi model pada penelitian dilakukan untuk mengetahui seberapa baik data yang digunakan pada hasil output prediksi dari presentase model dan sebagai ukuran dari

akurasi model terhadap penelitian yang digunakan. Pengujian akurasi model pada penelitian dapat dilakukan dengan melihat tabel *expectation-prediction evaluation* dari hasil *output* perangkat Eviews 12 *Student Lite*. Tabel *expectation-prediction evaluation* pada hasil penelitian menghitung presentase nilai estimasi yang benar (*correct*) dan salah (*incorrect*). Statistik Uji Akurasi Model dihitung dengan rumus :

$$Akurasi = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

Keterangan :

- TP (*True Positives*) : jumlah kasus yang benar-benar positif yang diprediksi dengan benar.
- TN (*True Negatives*) : jumlah kasus yang benar-benar negatif yang diprediksi dengan benar.
- FP (*False Positives*) : jumlah kasus negatif yang diprediksi sebagai positif.
- FN (*False Negatives*) : jumlah kasus positif yang diprediksi sebagai negatif.

Dengan menghitung akurasi, kita dapat memperoleh persentase prediksi yang benar dari seluruh data. Namun, dalam konteks regresi logit multinomial, akurasi saja tidak selalu cukup untuk memberikan gambaran lengkap tentang kinerja model. Oleh karena itu, metrik tambahan seperti precision, recall, dan F1-score sering digunakan untuk memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai kemampuan model dalam mengklasifikasikan setiap kategori WTP. Evaluasi akurasi model sangat penting untuk memastikan bahwa model yang dibangun dapat diandalkan dan memiliki daya prediksi yang baik dalam konteks pengambilan keputusan dan kebijakan terkait WTP.

